

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO DESENTRALISASI DAN
RASIO EFISIENSI DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : SRI WULANDARI
NPM : 1305170440
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

SRI WULANDARI. NPM. 1305170440 Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Dan Rasio Efisiensi Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Rasio Efisiensi Pemerintah serta untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio efisiensi. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat berupa data-data Laporan Realisasi Anggaran yang cukup jelas peneliti menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Langkat belum baik yang disebabkan oleh beberapa faktor, untuk rendahnya rasio kemandirian disebabkan kurang berkembangnya pemanfaatan sumber daya alam seperti sektor pertanian, pertambangan serta industri pengolahan, untuk rendahnya rasio desentralisasi disebabkan belum tercerminnya penentuan target pendapatan asli daerah (PAD) yang sebenarnya, untuk tingginya rasio efisiensi disebabkan belum adanya kesiapan aparatur-aparatur daerah sehingga belanja daerah meningkat. Meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Langkat untuk rasio kemandirian dengan memberikan pembelajaran masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam, untuk rasio desentralisasi diperlukan upaya menciptakan sektor perdagangan, manufaktur dan mengoptimalkan PAD yang sudah ada dan rasio efisiensi dengan mempersiapkan aparatur-aparatur daerah sesuai dengan bidangnya untuk mengurangi belanja daerah yang cukup tinggi.

Kata Kunci : *Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi, Rasio Efisiensi, Kinerja Keuangan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan HidayahNya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dimana merupakan persyaratan sidang meja hijau untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Sarwan dan ibunda tercinta Sainem, Serta abang saya Sardi Prastio, Akhmad Tohari Pane, kakak Siti Rahayu, dan adik Shilvia Tri Hartanti yang merupakan penyemangat bagi penulis untuk berjuang dengan segenap kemampuan, mendidik, memberi motivasi serta Do'a sehingga membawa penulis menjadi manusia yang berguna bagi keluarga.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Bapak Dosen dan Staf Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu dan Bapak di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.
10. Teman suka dan duka pendengar keluh kesah Ayu lestari, Ivo fauziah nst, Lidya Putri, Mirna Devi Sari Lbs, dan Riza Ardianti.
11. Terima kasih kepada seluruh Anak G Akuntansi pagi 2013 yang telah menjadi bagian dari awal kisah perjuangan kuliah di UMSU hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam hal penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam kegiatan riset maupun penyusunan skripsi, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua aamiinn....

Medan, September 2017

Penulis

Sri Wulandari
1305170440

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	11
a. Pengertian Pengukuran Kinerja.....	11
b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	12
c. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	13
1) Pengertian APBD	13
2) Struktur APBD	14
e. Tujuan Pengukuran Kinerja	17
f. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	18
g. Indikator Pengukuran Kinerja.....	19
2. Informasi Yang Digunakan dalam Pengukuran Kinerja	20
3. Permasalahan Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	22
4. Parameter Rasio Keuangan Daerah	23
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	24
b. Rasio Desentralisasi Fiskal	27
c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	29

d. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	30
e. Rasio Ekonomis.....	32
f. Rasio Keserasian.....	33
g. Rasio Pertumbuhan	34
B. Kerangka Berfikir	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Definisi Operasional.....	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian	43
D. Jenis Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
1. Deskripsi Data	46
2. Analisis Data	49
B. Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Tingkat Rasio Kemandirian	5
Tabel I-2	Tingkat Rasio Desentralisasi	6
Tabel I-3	Tingkat Rasio Efisiensi	7
Tabel II-1	Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah.....	26
Tabel II-2	Kriteria Desentralisasi Fiskal	28
Tabel II-3	Kriteria Kemampuan Efisiensi.....	30
Tabel II-4	Kriteria Kemampuan Efektivitas.....	31
Tabel II-5	Kriteria Kemampuan Ekonomis.....	32
Tabel II-6	Penelitian Terdahulu	36
Tabel III-1	Waktu Penelitian	43
Tabel IV-1	Laporan Realisasi Anggaran Kab. Langkat	46
Tabel IV-2	Laporan Realisasi Anggaran Kab. Langkat	47
Tabel IV-3	Laporan Realisasi Anggaran Kab. Langkat	47
Tabel IV-4	Tabel IV.4 Rasio Kemandirian	51
Tabel IV-5	Tabel IV.5 Rasio Desentralisasi.....	54
Tabel IV-	Tabel IV.6 Rasio Efisiensi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Kerangka Berfikir	40
Gambar IV-1	Grafik Rasio Kemandirian	47
Gambar IV-2	Grafik Rasio Desentralisasi.....	52
Gambar IV-3	Grafik Rasio Efisiensi	56
Gambar IV-4	Grafik Ketiga Rasio	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Keberhasilan sebuah organisasi sektor publik tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau deposit dalam laporan keuangan tidak menjadi tolak ukur keberhasilan, karena sifat dasarnya sebuah organisasi sektor publik tidak mencari profit, maka dari itu keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya dengan pelaporan. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik yang menggambarkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai serta gambaran penting kondisi saat ini dan informasi penting disetiap fase perjalanan organisasi sektor publik dalam mencapai visi dan misinya. Juga bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam memonitori, memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Untuk mencapai suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, strategi dan kebijakan ekonomi pembangunan harus fokus pada sektor-sektor strategis dan potensial pada wilayah tersebut baik sektor riil, finansial, maupun infrastruktur agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu

monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan juga sangat penting dilakukan secara berkala melalui sajian data statistik yang berkualitas. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai keberhasilan baik atau tidak dalam menjalankan tugasnya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007:230).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dari perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai perwujudan keseluruhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Sebagaimana menurut James B. Whittaker (1995) dalam *government performance and result act, a mandate for strategic planning and performance measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat

manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Terdapat unsur akuntabilitas dalam *good governance* yang baik, dimana pemerintah diharapkan dapat melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai. Beberapa rasio yang dapat digunakan diantaranya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (Abdul Halim 2007), rasio desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2007). dan rasio efisiensi daerah (Abdul Halim 2007).

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007, hal. 233).

Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (mahmudi, 2007, hal. 128).

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikategorikan efisien atau kinerja semakin baik apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen (Halim, 2007 hal 234).

Pemerintahan Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan otonomi daerah. Pelaksanaan APBD Kabupaten Langkat berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber penerimaan daerah, yang pengelolaannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Peraturan Perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio desentralisasi dan Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel I.1 Tingkat Rasio Kemandirian
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2012-2016**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Persentase Kemandirian
2012	129.242.580.780,08	1.199.681.652.853,00	10,77 %
2013	65.521.499.189,41	1.419.706.153.815,00	4,61 %
2014	107.811.975.547,21	1.540.371.084.996,00	6,99 %
2015	122.715.359.909,79	1.804.265.890.307,00	6,80 %
2016	132.673.213.412,93	1.885.124.794.037,00	7,03 %

Sumber : Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel I-1 terlihat bahwa rendahnya Rasio Kemandirian dimana tahun 2012 sampai 2016 dimana persentase berada pada 0-25% yang tergolong kriteria rendah sekali (Andri Haryanto, 2014;21). Abdul Halim (2007; 234) mengatakan bahwa rendahnya Rasio Kemandirian menggambarkan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern terutama pemerintah pusat dan provinsi.

Semakin tinggi rasio kemandirian, menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) dan juga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. (Abdul Halim, 2002; 128).

Mudrajad Kuncoro (2014; 15) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominanya transfer dari pemerintah pusat. Dari tabel diatas dapat dilihat pendapatan transfer Kabupaten Langkat lebih tinggi dari pendapatan asli daerahnya, hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Masih ketergantungan oleh Pemerintah Pusat.

**Tabel I.2 Tingkat Rasio Desentralisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2012-2016**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase Desentralisasi
2012	129.242.580.780,08	1.378.567.032.459,08	9,37 %
2013	65.521.499.189,41	1.555.901.880.204,41	4,21 %
2014	107.811.975.547,21	1.682.148.382.104,21	6,40 %
2015	122.715.359.909,79	2.020.688.705.016,79	6,07 %
2016	132.673.213.412,93	2.215.047.135.449,93	5,98 %

Sumber : Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel I-2 terlihat bahwa masih rendahnya Rasio Desentralisasi pada tahun 2012 sampai tahun 2016 karena persentase berada diantara 0-10% yang tergolong pada kriteria sangat kurang (Andri Haryanto, 2014;23). Menurut Mahmudi (2010;142) Rasio Desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan, dimana semakin tinggi kontribusi PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi semakin baik.

Mardiasmo (2002; 146) mengatakan bahwa dalam menjalankan desentralisasi Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) nya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah.

Mudrajad Kuncoro (2014; 13) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan desentralisasi dan penyebab PAD yang rendah sehingga tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat yaitu : kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, banyaknya pajak daerah akan tetapi hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah, kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber

keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme, lemahnya dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

**Tabel I.3 Tingkat Rasio Efisiensi
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2012-2016**

Tahun	Total Belanja	Total Pendapatan	Persentase Efisiensi
2012	1.329.229.102.792,52	1.378.567.032.459,08	96,42%
2013	1.536.811.928.028,03	1.555.901.880.204,41	98,77%
2014	1.605.301.211.464,57	1.682.148.382.104,21	95,43%
2015	1.819.224.899.770,10	2.020.688.705.016,79	90,02%
2016	2.287.199.857.314,68	2.215.047.135.449,93	103,25%

Sumber : Data diolah (2017)

Berdasarkan dari tabel I-3 dapat dilihat bahwa tingginya rasio efisiensi sehingga dikatakan tidak efisien karena persentase mencapai di atas 100%. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya. (Dedi Nordiawan dan Hertanti , 2010; 161).

Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mahmudi 2010: 143).

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Dori Saputra (2014). Tentang kemandirian dan efektifitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan analisis rasio kemandirian dan analisis rasio efektifitas sebagai alat analisisnya. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam periode 2004-2011 masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang rendah sekali dan secara trend kemandirian

dari tahun 2005-2011 berada pada kecendrungan menurun. Sedangkan untuk analisis rasio efektifitas masuk dalam kategori keuangan yang sangat efektif secara rata-rata dari tahun 2004-2011 dan untuk trend efektivitas keuangan daerah menunjukkan cenderung naik.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang berjudul “**Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio Efisiensi Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Masih rendahnya Rasio kemandirian dan Rasio Desentralisasi pada tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Tingginya Rasio Efisiensi pada tahun 2012 sampai tahun 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Rasio Kemandirian dan Rasio Desentralisasi Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun 2016 ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Rasio Efisiensi Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun 2016 ?
3. Bagaimanakah meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio efisiensi pada 2012 sampai tahun 2016 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Rasio Kemandirian dan Rasio Desentralisasi Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun 2016.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Rasio Efisiensi Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun 2016.
3. Untuk meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio efisiensi pada tahun 2012 sampai tahun 2016.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, menambah pemahaman penulis tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya, dapat memberikan sumbangan wawasan dan sebagai bahan pembanding terhadap penelitian akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengukuran Kinerja Keuangan

a. Pengertian pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Abdul Halim, 2004, hal;18).

Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public menilaikinerja pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2009, hal;121).

Pengukuran kinerja merupakan menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik yaitu dengan menggambarkan kemampuan uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Ihyaul Ulum, 2009, hal;19).

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordiawan dan Hertanti, 2010, hal;158).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan penilaian untuk melihat tingkat pencapaian dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh suatu oraganisasi dan hasil dari pengukuran tersebut memberikan motivasi dan arah untuk kedepan yang lebih baik.

b. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Abdul Halim, 2004, Hal. 20).

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.

Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan

Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Pengertian APBD

APBD merupakan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah dalam menutupi pengeluaran daerah (Mamesah dalam Halim, 2007;20).

Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) (pasal 1 UU No.32 tahun 2004).

APBD adalah Suatu rencana pekerjaan keuangan (*Financial work plan*) yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dimana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan sehubungan dengan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondsleg*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran (Abdul Halim 2007, hal 20).

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiran penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

2) Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai berikut :

a) Pendapatan daerah

Pendapatan adalah semua rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dari periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbang dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Standar Akuntansi Pemerintah, 2005 ;107)

b) Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Belanja daerah adalah

menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c) Pembiayaan daerah

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto. Pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu;

- (1) Penerimaan Pembiayaan: Penggunaan SILPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat, pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank, pinjaman dalam negeri lainnya, penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, dan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non bank (Mahmudi, 2010;76).

e. Tujuan pengukuran kinerja

Mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik (mahmudi,2007, hal;14) yaitu :

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai
- 3) Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*.
- 5) Memotifikasi pegawai.
- 6) Menciptakan akuntabilitas public.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan (Mardiasmo, 2009;121) yaitu :

- 1) Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tujuan pengukuran kinerja menurut (Ihyaul Ulum, 2009, hal;20) adalah :

- 1) Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan pengukuran kinerja dapat disimpulkan, yaitu :

- 1) Mengetahui tingkat pencapaian organisasi.
- 2) Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.

- 3) Memotivasi pegawai.
- 4) Untuk mengalokasi sumber daya dan pembuatan keputusan
- 5) Menciptakan akuntabilitas publik.

f. Manfaat pengukuran kinerja

Manfaat pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2009;122) yaitu :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang di ukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki organisasi.
6. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
7. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Menurut Ihyaul Ulum (2009, hal;21) manfaat pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu :

1. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Untuk memonitori dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
3. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
4. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

g. Indikator Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Keuangan Daerah (Mohamad Mahsun, 2012;196) meliputi :

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*), misalnya :
 - a) Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b) Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c) Jumlah infrastruktur yang ada
 - d) Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (*Proses*), misalnya :
 - a) Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b) Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan jasa
- 3) Indikator Keluaran (*Output*), misalnya :
 - a) Jumlah produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya :
 - a) Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b) Produktivitas para karyawan atau pegawai

5) Indikator Manfaat (*Benefit*), misalnya :

- a) Tingkat kepuasan masyarakat
- b) Tingkat partisipasi masyarakat

6) Indikator *Impact*, misalnya :

- a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b) Peningkatan pendapatan masyarakat

2. Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja

Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja dikelompokkan dalam dua kategori (Ihyaul Ulum, 2009,22), yaitu :

a. Informasi Finansial

Penilaian laporan kerja financial di ukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dimana pengukurannya dilakukan dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang di anggarkan.

1) Varian pendapatan

Kesenjangan anggaran pendapatan terjadi ketika target pendapatan ditentukan lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Untuk mengetahui berapa besaran kesenjangan anggaran pendapatan ini, maka terlebih dahulu harus “diketahui” berapa potensi pendapatan, yang bisa saja bersifat laten (tersembunyi) karena tidak dinyatakan secara eksplisit (tertulis). Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 1999tentang Perimbangan, sumber-sumber pendapatan terdiri atas :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari, Pajak daerah, Retribusi daerah, Bagian laba usaha daerah, Lain-lain PAD yang sah.

- b) Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, Dana alokasi umum (DAU), Dana alokasi khusus (DAK).
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang syah meliputi hibah, Dana darurat, Bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, Dana penyesuaian, Dana otonomi khusus, Bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

2) Varian pengeluaran

Varian pengeluaran dalam APBD terdiri dari :

a) Varian belanja rutin

Anggaran belanja rutin merupakan anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat lancer, rutin dan secara terus menerus yang di maksudkan untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

b) Varian belanja bangunan

Anggaran pembelanjaan pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang di capai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sector industri, pertanian, kehutanan, hokum, transportasi, dan lain sebagainya (Abdul Halim, 2004 ; 223-226)

b. Informasi Nonfinansial

Informasi Nonfinansial dapat dijadiantolak ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses kerja

manajemen, informasi nonfinansial biasanya digunakan dalam pengukuran kinerja dalam menggunakan balanced scorecard (Ihyaul Ulum, 2009;23).

Informasi Nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk variable kunci atau dinamakan sebagai *key success factor*, *key result* atau *pulse point*. Variable kunci adalah variable yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan maka variable harus disesuaikan.

Beberapa karakteristik variable kunci, yaitu :

- 1) Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi..
- 2) Sangat volatile dan dapat berubah sangat cepat.
- 3) Perubahannya tidak dapat diprediksi
- 4) Jika terjadi perubahan harus segera ambil tindakan
- 5) Variable tersebut dapat diukur.

3. Permasalahan pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut I Gusti Agung (2010; 18) mengatakan permasalahan dalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu :

- 1) Pemerintah memberikan kewajiban dan nilai bukan produk/barang kepada masyarakat.
- 2) Organisasi-organisasi public biasanya lebih banyak melibakan suatu proses dari pada produk. Dalam hal pembuatan suatu kebijakan, banyak pihak yang terlibat dalam proses konsultasi dan negosiasi antar instansi.
- 3) Suatu proses yang baik belum tentu menghasilkan produk akhir yang dapat diterima oleh semua pihak.
- 4) Kinerja dari organisasi public saling berkaitan satu dengan yang lainnya, suatu hasil dicapai melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

- 5) Unsur sebab-akibat dalam sektor publik sering kali tidak diketahui dan tidak jelas
- 6) Permasalahan pengukuran kinerja akan semakin meningkat manakala lingkungan organisasi sangat dinamis seperti kebijakan/peraturan yang selalu berubah-ubah.

Menurut Moeheriono (2014; 118) salah satu hal penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam upaya peningkatan dan akuntabilitas sektor publik adalah :

- 1) Meningkatkan kemampuan setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan Fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan dan pembangunannya.
- 2) Penataan sistem dan proses manajemen pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan berkinerja tinggi.
- 3) Manajemen kinerja yang berorientasi pada *outcome oriented* sehingga apa yang dihasilkan oleh mereka melalui proses manajemen benar-benar efisien dan efektif serta ekonomis sehingga menunjukkan kinerja serta akuntabilitas yang baik.

4. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam

APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Abdul Halim, 2007;231)

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Abdul Halim, 2007;232).

Analisis kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrove, Richard A, dan B Musgrove, Peggy dalam bukunya “*Public Finance In Theory and Practice* (dalam Rekso Hadipradjo, Ekonomi publik)”, namun dalam penerapannya disesuaikan dengan kemampuan dalam APBD. Menurut Abdul halim (2002;128) menyatakan beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD dapat dipakai untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, serta *debt servise coverage*.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD)

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah (Ihyaul Ulum, 2009;31).

Rasio Kemandirian Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/provinsi}} \times 100 \%$$

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah seperti, dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) (Abdul Halim, 2007;234).

Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Abdul Halim 2002;128).

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan kinerja keuangan	Persentase Kemandirian (%)
Rendah sekali	0,00 – 25 %
Rendah	25% – 50 %
Sedang	50% – 75 %
Tinggi	75% – 100 %

Sumber : (Halim, 2010:34 dalam Arson, 2011).

- 1) Rendah sekali, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- 2) Rendah, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- 3) Sedang, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Tinggi, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Lazyra, 2016; 28).

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diharapkan akan menghasilkan manfaat nyata yaitu mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah (Mardiasmo 2002;6)

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2010: 142).

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Bisma 2010 ; 78).

Rasio desentralisasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria untuk menetapkan Desentralisasi fiskal keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2
Kriteria Kemampuan Desentralisasi Fiskal

Kemampuan kinerja keuangan	Persentase Desentralisasi %
Sangat kurang	0,00– 10,0 %
Kurang	10,01– 20,00 %
Sedang	20,01– 30,00 %
Cukup	30,01– 40,00 %
Baik	40,01– 50,00 %
Sangat baik	>50%

Sumber : (tim litbang depdagri dalam Andri Haryanto 2014)

Mudrajad Kuncoro (2014; 49) Prinsip Desentralisasi Fiskal Pada pasal 2 UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah :

- 1) Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sitem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Pemberian sumber Keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahantugas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antardaerah.
- 3) Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah aktivitas dalam sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya. (Dedi Nordiawan dan Hertanti, 2010; 161).

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2007; 234).

Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila organisasi tersebut :

(1) menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu; (2) menghasilkan output tetap dengan input lebih rendah dari yang seharusnya; (3) menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumber dayanya; dan (4) mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin.

(I Gusti Agung, 2010)

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien (Mahmudi, 2010: 143).

Rasio Efisiensi Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kriteria untuk menetapkan Kemampuan Efisiensi daerah dapat dikategorikan seperti tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
kriteria Kemampuan Efisiensi Daerah

Kemampuan kinerja keuangan	Persentase efisiensi%
Tidak Efisien	Diatas 100 %
Kurang Efisien	90-100%
Cukup efisien	80-90%
Efisien	60-80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber : (keputusan Mendagri dalam Syahri Mahbengi 2017)

Kinerja pemerintah daerah dikategorikan efisien dalam melakukan pemungutan pendapatan apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen, semakin kecil rasio berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Abdul Halim,2007;234).

Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD (Mahmudi 2010: 143).

d. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan

Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

(Halim, 2002, hal. 128) Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. (Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 dalam Andri) mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel II.4
Kriteria Kemampuan Efektivitas Daerah

Kemampuan kinerja keuangan	Persentase Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100 %
Efektif	90% – 100 %
Cukup efektif	80% – 90 %
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	0% - 60%

(Sumber :Kepmendagri No.690.900-327 dalam Andri Haryanto 2014)

e. Rasio Ekonomis

Konsep ekonomis sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan, ekonomi merupakan ukuran relatif.

Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu, Arfan ikhsan, Muhammad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;275). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya.

Rumus rasio ekonomis adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100 \%$$

Tabel II.5
Kriteria Kemampuan Ekonomis Daerah

Kemampuan kinerja keuangan	Persentase Ekonomis (%)
Ekonomis	Kurang dari 100%
Ekonomis Berimbang	Sama dengan 100%
Tidak Ekonomis	Lebih dari 100%

Sumber : (Mohammad mahsun dalam Syahri Mahbengi 2017)

Arfan ikhsan, Muhammad Yamin, Heny Tri Astuti dan Hamdani (2015;275). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

f. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012 hal.236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja

Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Menurut Mahmudi (2011 hal.164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2011 hal. 164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

g. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang

negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu.

Menurut Mahmudi (2011 hal.138) Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)}$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian.

Menurut Halim (2008;241) untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

Tabel II.6
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih (2010)	Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo	Variable : Kinerja keuangan, Pertumbuhan Ekonomi	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah, rasio efisiensi belanja cenderung menurun, artinya Belanja Daerah cenderung efisien sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan meskipun dalam angka yang relatif kecil.
Joko Pramono (2012)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Variabel : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio DSCR	Kinerja keuangan Pemerintah kota Surakarta digambarkan masih kurangnya pada aspek keserasian dan aspek kemandirian.
Intan Suay Harahap (2015)	Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus	Variabel : Kinerja Keuangan Rasio efektivitas, Rasio Kemandirian dan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas keuangan Kabupaten Bogor masuk dalam kategori cukup efektif sementara tingkat kemandirian Kabupaten Bogor masih dalam kategori

	Kabupaten Bogor Periode Anggaran 2010-2014)		kurang, sedangkan tingkat kemampuan masuk dalam kategori cukup.
Citra Ananda dan Widyatmini (2012)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2009-2011	Variabel : Anggaran, Pendapatan, Belanja, Kinerja Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang dikatakan cukup baik secara garis besar, namun mempunyai kekurangan yaitu masih bergantung pada pemberian dari Pemerintah Pusat dan kurang memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Dalam penerapan realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga sudah cukup baik, hanya saja belanja yang di alokasikan untuk belanja operasi lebih besar bila dibandingkan dengan belanja modal.

B. Kerangka Berfikir

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Sedangkan laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menganalisis Kinerja Keuangan adalah suatu proses penilaian mengenal tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2016 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, antara lain : Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi, dan Rasio Efisiensi.

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kinerja pemerintah daerah dikatakan tidak tergantung terhadap pemerintah pusat apabila semakin tinggi rasiokemandirian yang dicapai maka tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat semakin rendah

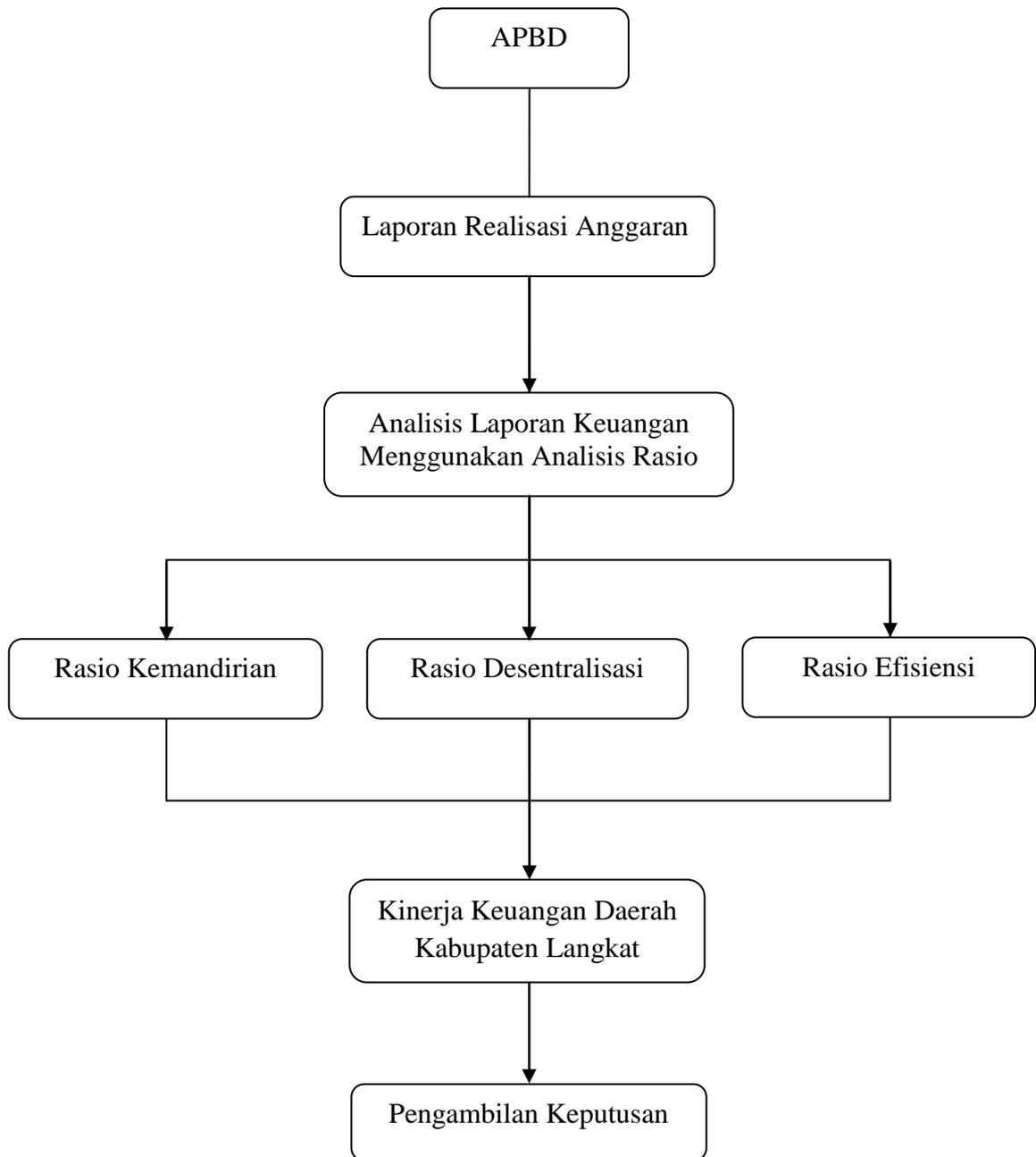
Rasio desentralisi fiskal adalah untuk melihat kemampuan suatu daerah menjalankan tanggung jawab yang diberikan pusat dalam menggali dan mengelola

pendapatan yang dimiliki dapat diukur dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan, Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikategorikan efisien atau kinerja semakin baik apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat. Jika semua rasio diatas menunjukkan hasil persentase yang sesuai kriteria, maka diambilah keputusan hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dapat dikatakan baik.

Berikut ini di tampilkan kerangka berfikir dalam penelitian ini :



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan menyajikan data yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas kepada penulis untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Menurut Sugiyono (2012 hal 13) Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel itu adalah menjelaskan bagaimana variabel itu dapat di ukur, dengan memberi arti atau penjelasan kegiatan dengan tujuan untuk melihat pentingnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan juga untuk mempermudah pemahaman dan membahas penelitian nantinya.

Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dimana

kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu:

Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ini menggambarkan perbandingan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman.

Kemandirian dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/provinsi}} \times 100 \%$$

Rasio Desentralisasi fiskal, rasio ini membandingkan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan.

Desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

Rasio efisiensi keuangan daerah, rasio ini menggambarkan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memungut pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat yang bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.1 Stabat Telp. (061) 8910202 / Ex Station 15.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2017 s/d Oktober 2017. Berikut ini adalah tabel perincian jadwal kegiatan penelitian :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Riset																
3	Penyusunan Proposal																
4	Seminar Proposal																
5	Perbaikan Proposal																
6	Penyusunan Skripsi																
7	Sidang Meja Hijau																

D. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yaitu :

Data Kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal yang dapat dihitung yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Langkat periode 2012- 2016.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu :

Data Sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada dan sudah di olah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Langkat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang ada dalam dokumen instansi pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2012-2016.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini pada objek penelitian.
2. Menghitung data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi, dan Rasio Efisiensi.

3. Menganalisis data dengan menggunakan pengukuran Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio Efisiensi.
4. Menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan pengukuran Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio Efisiensi.
5. Menarik kesimpulan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Langkat adalah laporan yang menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Berikut adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun 2016 :

**Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah Kab. Langkat
Tahun 2012 dan 2013**

Uraian	2012		2013	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	134.144.946.610,00	129.242.580.780,08	73.930.081.932,00	65.521.499.189,41
Pendapatan Transfer	1.206.701.835.588,00	1.199.681.652.853,00	1.426.437.444.548,00	1.419.706.153.815,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	49.178.924.000,00	49.642.798.826,00	103.289.462.000,00	70.674.227.200,00
Total Pendapatan	1.390.025.706.198,00	1.378242.580.780,08	1.603.656.988.480,00	1.555.901.880.204,41
Belanja Operasi	1.119.203.292.575,00	1.074.125.239.841,64	1.336.197.540.122,00	1.228.208.073.074,60
Belanja Modal	274.979.366.919,00	255.052.590.450,88	352.507.090.823,00	308.212.154.953,43
Belanja Tak Terduga	468.507.150,00	51.272.500,00	5.066.515.422,00	391.700.000,00
Penerimaan Daerah	51.752.173.193,64	51.273.223.193,64	93.114.157.887,00	92.702.257.390,20
Pengeluaran Daerah	7.703.994.973,00	7.703.994.973,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Pembiayaan	44.048.178.220,64	43.776.228.220,64	90.114.157.887,00	89.702.257.390,20
Total Belanja	1.394.651.166.644,00	1.329.229.102.792,52	1.693.771.146.367,00	1.526.811.928.03,00
SILPA	39.422.717.774,64	93.114.157.887,20	-	108.792.209.566,58

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat

**Tabel IV.2 Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah Kab. Langkat
Tahun 2014 dan 2015**

Uraian	2014		2015	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	107.142.284.356,00	107.811.975.547,21	111.750.322.000,00	122.715.359.909,79
Pendapatan Transfer	1.464.702.656.326,00	1.540.371.084.996,00	1.806.721.057.662,00	1.804.265.890.307,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	51.862.945.454,00	33.965.321.561,00	99.227.731.800,00	93.707.454.800,00
Total Pendapatan	1.623.707.886.136,00	1.682.148.382.104,21	2.017.699.111.462,00	2.020.688.705.016,79
Belanja Operasi	1.397.305.958.586,32	1.275.758.416.732,69	1.499.821.796.039,00	1.321.557.404.368,00
Belanja Modal	375.267.931.914,26	329.542.794.731,88	609.102.563.188,00	497.257.525.402,10
Belanja Tak Terduga	8.349.045.000,00	-	11.279.924.183,22	409.970.000,00
Penerimaan Daerah	160.215.049.364,58	105.489.258.035,58	221.397.090.170,22	181.336.445.301,05
Pengeluaran Daerah	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.173.089.590,00	3.173.089.590,00
Pembiayaan	157.215.049.364,58	104.489.258.035,58	218.224.000.580,22	178.163.355.771,05
Total Belanja	1.780.992.935.500,58	1.605.301.211.464,57	2.120.204.283.410,22	1.819.224.899.770,10
SILPA	-	181.336.428.675,22	-	263.908.332.325,74

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat

**Tabel IV.3 Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah Kab. Langkat
Tahun 2016**

Uraian	2016	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	121.669.944.360,00	132.673.213.412,93
Pendapatan Transfer	2.017.408.028.502,00	1.885.124.794.037,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang syah	197.249.128.000,00	197.249.128.000,00
Total Pendapatan	2.336.327.100.862,00	2.215.047.135.449,93
Belanja Operasi	1.590.585.289.825,00	1.379.788.395.399,82
Belanja Modal	675.395.548.894,00	626.295.461.426,86
Belanja Tak Terduga	2.191.257.926,00	836.025.412,00
Penerimaan Daerah	263.908.332.325,00	263.908.332.325,74
Pengeluaran Daerah	50.101.680.530,00	50.101.680.530,00
Pembiayaan	213.806.651.795,00	213.806.651.795,74
Total Belanja	2.548.491.552.657,00	2.287.199.857.314,68
SILPA	1.642.200.000,00	141.653.929.930,99

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat

Pada tabel Laporan Realisasi Anggaran di atas menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Langkat meliputi: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan baik dari segi yang di anggarkan maupun yang terealisasi. Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat berasal dari tiga sumber yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari hasil kekayaan yang dimiliki daerah Kabupaten Langkat yang mana meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang meliputi : Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus,.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah meliputi : Pendapatan Bantuang Keuangan dari Provinsi dan Pendapatan Lainnya.

Sedangkan Belanja Daerah Kabupaten Langkat tahun 2012 sampai tahun 2016 juga mengalami peningkatan baik yang dianggarkan maupun yang terealisasi. Belanja Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Langkat dalam menjalankan roda pemerintahanya yang mana Belanja Operasinya meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.

2. Belanja Modal merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pembangunan dan pelayanan kepada publik, belanja modal yaitu meliputi : Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang dilakukan diluar dari belanja yang telah direncanakan yang meliputi Belanja Tak Terduga.

Pembiayaan bersih daerah Kabupaten Langkat dari tahun 2012 sampai tahun 2016 baik hal ini disebabkan pendapatan daerah lebih besar dibandingkan pengeluaran daerah. Pembiayaan daerah Kabupaten Langkat meliputi :

1. Penerimaan Daerah meliputi : Penggunaan SILPA, Penerimaan Kembali Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Non Permanen Daerah.
2. Pengeluaran Daerah meliputi : Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Langkat tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang mana disebabkan selisih antara surplus (pendapatan lebih besar dibandingkan belanja daerah).

2. Analisis Data

a. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Pusat/provinsi}} \times 100 \%$$

Ketentuan :

- 1) Jika 0,00 – 25 % maka rendah sekali
- 2) Jika 25 – 50 % maka rendah
- 3) Jika 50 – 75 % maka sedang
- 4) Jika 75 – 100 % maka tinggi

Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{129.242.580.780,08}{1.199.681.652.853,00} \times 100 \% \\ &= 10,77 \% \\ \text{Tahun 2013} &= \frac{65.521.499.189,41}{1.419.706.153.815,00} \times 100 \% \\ &= 4,61 \% \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{107.811.975.547,21}{1.540.371.084.996,00} \times 100 \% \\ &= 6,99 \% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{122.715.359.909,79}{1.804.265.890.307,00} \times 100 \% \\ &= 6,80 \% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{132.673.213.412,93}{1.885.124.794.037,00} \times 100 \% \\ &= 7,03 \% \end{aligned}$$

Pengukuran Kinerja Kemandirian Keuangan Kabupaten Langkat dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

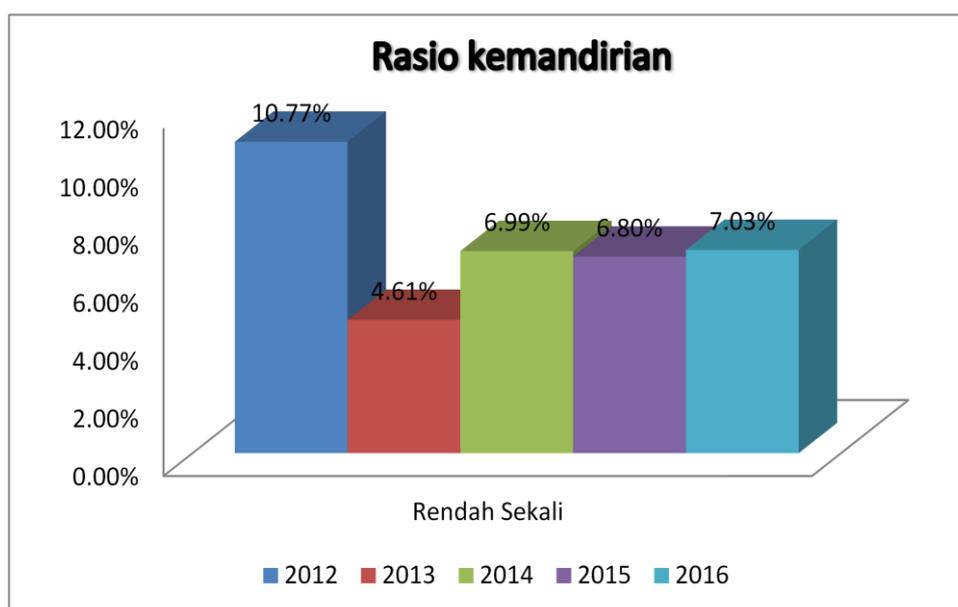
**Tabel IV.4 Rasio Kemandirian
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2012-2016**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Persentase Kemandirian	Kriteria
2012	129.242.580.780,08	1.199.681.652.853,00	10,77 %	Rendah Sekali
2013	65.521.499.189,41	1.419.706.153.815,00	4,61 %	Rendah Sekali
2014	107.811.975.547,21	1.540.371.084.996,00	6,99 %	Rendah Sekali
2015	122.715.359.909,79	1.804.265.890.307,00	6,80 %	Rendah Sekali
2016	132.673.213.412,93	1.885.124.794.037,00	7,03 %	Rendah Sekali

Sumber : Data diolah peneliti (2017)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2012 sampai tahun 2016 tidak mengalami perubahan kriteria, setiap tahunnya tergolong kriteria Rendah sekali yang berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2012 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat belum dapat dikatakan mandiri bahkan belum mendekati mandiri hal ini ditunjukkan dengan data pendapatan asli daerah sebesar 129.242.580.780,08 dan pendapatan transfer pusat 1.199.681.652.853,00 dengan persentase 10,77 % dan tergolong kriteria rendah sekali karena persentase berada pada 0 – 25%. Pada tahun 2013 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami penurunan dari tahun 2012 yang mana disebabkan oleh pendapatan asli daerah turun menjadi 65.521.499.189,41 dan naiknya pendapatan transfer pusat menjadi 1.419.706.153.815,00 sehingga persentase menjadi 4,61 % dan masih tergolong pada kriteria rendah sekali karena berada pada 0 – 25%. Pada tahun 2014 Kinerja Kemandirian Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini di lihat dari naiknya pendapatan asli daerah menjadi 107.811.975.547,21 dan pendapatan transfer pusat sebesar 1.540.371.084.996,00 dengan persentase 6,99 % dan masih tergolong pada kriteria rendah sekali karena persentase berada pada 0 – 25%. Pada tahun 2015 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami penurunan dari tahun 2014 dengan pendapatan asli daerah naik menjadi 122.715.359.909,79 akan tetapi pendapatan transfer pusat lebih besar menjadi 1.804.265.890.307,00 sehingga persentase turun menjadi 6,80 % dan masih tergolong pada kriteria rendah sekali karena berada pada 0 – 25%. Pada tahun 2016 Kinerja Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015, hal ini di lihat dari naiknya pendapatan asli daerah menjadi 132.673.213.412,93 dan pendapatan transfer pusat sebesar 1.885.124.794.037,00 dengan persentase 7,03 % dan masih tergolong pada kriteria rendah sekali karena persentase berada pada 0 – 25%.



Gambar IV.1 Grafik Rasio Kemandirian

b. Rasio Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan tingginya kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Desentralisasi fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100 \%$$

Ketentuan :

- 1) Jika 0,00 – 10,0 % maka Sangat kurang
- 2) Jika 10,01– 20,00 % maka Kurang
- 3) Jika 20,01– 30,00 % maka Sedang
- 4) Jika 30,01– 40,00 % maka Cukup
- 5) Jika 40,01– 50,00 % maka Baik
- 6) Jika >50% maka Sangat baik

Perhitungan Rasio Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{129.242.580.780,08}{1.378242.580.780,08} \times 100 \% \\ &= 9,37 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{65.521.499.189,41}{1.555.901.880.204,41} \times 100 \% \\ &= 4,21 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{107.811.975.547,21}{1.682.148.382.104,21} \times 100 \% \\ &= 6,40 \% \\ \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{122.715.359.909,79}{2.020.688.705.016,79} \times 100 \% \\ &= 6,07 \% \\ \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{132.673.213.412,93}{2.215.047.135.449,93} \times 100 \% \\ &= 5,98 \% \end{aligned}$$

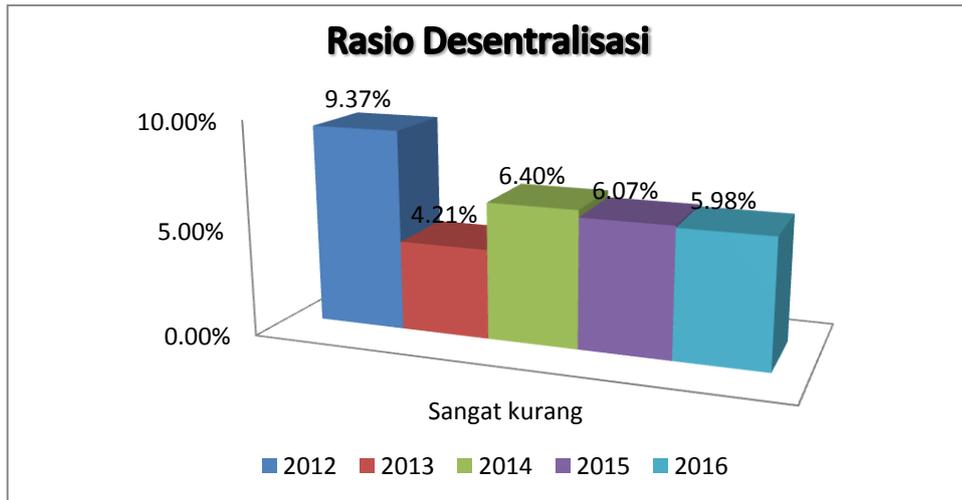
**Tabel IV.5 Rasio Desentralisasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2012-2016**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase Desentralisasi	Kriteria
2012	129.242.580.780,08	1.378.567.032.459,08	9,37 %	Sangat kurang
2013	65.521.499.189,41	1.555.901.880.204,41	4,21 %	Sangat kurang
2014	107.811.975.547,21	1.682.148.382.104,21	6,40 %	Sangat kurang
2015	122.715.359.909,79	2.020.688.705.016,79	6,07 %	Sangat kurang
2016	132.673.213.412,93	2.215.047.135.449,93	5,98 %	Sangat kurang

Sumber : Data diolah (2017)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran Kinerja Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2012 sampai tahun 2016 tidak mengalami perubahan kriteria, setiap tahunnya tergolong kriteria sangat kurang yang berarti sangat kurangnya tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2012 kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten langkat dilihat dari data pendapatan asli daerah sebesar 129.242.580.780,08 dan total pendapatan sebesar 1.378.567.032.459,08 dengan persentase rasio desentralisasi 9,37 %, hal ini

tergolong pada kriteria sangat kurang karena persentasenya berada diantara 0,00 – 10,0 %. Pada tahun 2013 Kinerja Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami penurunan dari tahun 2012 yang mana disebabkan oleh turunnya pendapatan asli daerah menjadi 65.521.499.189,41 dan total pendapatan sebesar 1.555.901.880.204,41 sehingga persentase menjadi 4,21 % dan masih tergolong pada kriteria sangat kurang karena persentasenya berada diantara 0,00 – 10,0 %. Pada tahun 2014 Kinerja Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini di lihat dari naiknya pendapatan asli daerah menjadi 107.811.975.547,21 dan total pendapatan sebesar 1.682.148.382.104,21 dengan persentase 6,40 % dan masih tergolong pada kriteria sangat kurang karena persentasenya berada diantara 0,00 – 10,0 %. Pada tahun 2015 Kinerja Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami penurunan dari tahun 2014 akan tetapi pendapatan asli daerah naik menjadi 122.715.359.909,79 dan total pendapatan lebih meningkat menjadi 2.020.688.705.016,79 dengan persentase turun menjadi 6,07 % dan masih tergolong pada kriteria sangat kurang karena persentasenya berada diantara 0,00 – 10,0 %. Pada tahun 2016 Kinerja Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat lebih menurun dari tahun 2015 tetapi pendapatan asli daerah mengalami kenaikan menjadi 132.673.213.412,93 dan total pendapatan lebih meningkat menjadi 2.215.047.135.449,93 akan tetapi persentase turun menjadi 5,98 % dan masih tergolong pada kriteria sangat kurang karena persentasenya berada diantara 0,00 – 10,0 %.



Gambar IV.2 Grafik Rasio Desentralisasi

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kinerja pemerintah daerah dikategorikan efisien dalam melakukan pemungutan pendapatan apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100 persen, semakin kecil rasio berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Ketentuan :

- 1) Jika >100 % maka Tidak Efisien
- 2) Jika 90-100% maka Kurang Efisien
- 3) Jika 80-90% maka Cukup efisien

4) Jika 60-80% maka Efisien

5) Jika < 60% maka Sangat Efisien

Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat

tahun 2012 sampai tahun 2016 sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{1.329.229.102.792,52}{1.378242.580.780,08} \times 100 \% \\ &= 96,42\% \\ \text{Tahun 2013} &= \frac{1.536.811.928.028,03}{1.555.901.880.204,41} \times 100 \% \\ &= 98,77\% \\ \text{Tahun 2014} &= \frac{1.605.301.211.464,57}{1.682.148.382.104,21} \times 100 \% \\ &= 95,43\% \\ \text{Tahun 2015} &= \frac{1.819.224.899.770,10}{2.020.688.705.016,79} \times 100 \% \\ &= 90,02\% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{2.287.199.857.314,68}{2.215.047.135.449,93} \times 100 \% \\ &= 103,25\% \end{aligned}$$

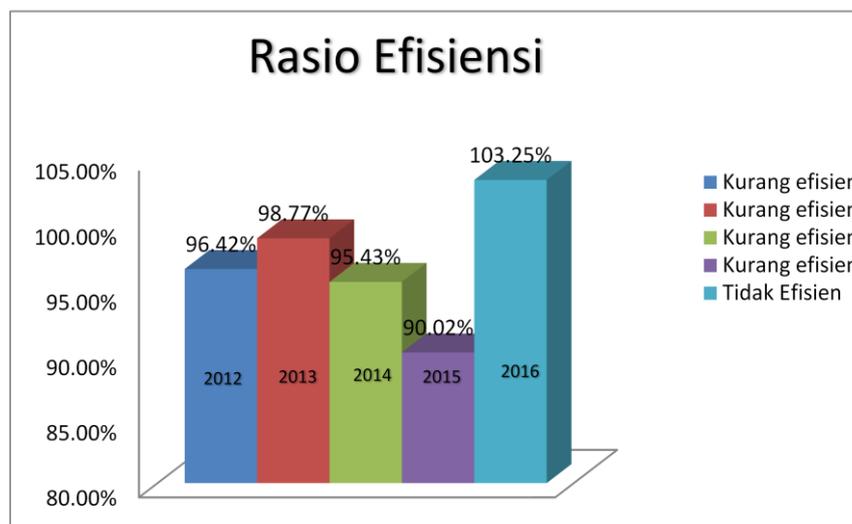
**Tabel IV.6 Rasio Efisiensi
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2012-2016**

Tahun	Total Belanja	Total Pendapatan	Persentase Efisiensi	Kriteria
2012	1.329.229.102.792,52	1.378.567.032.459,08	96,42%	Kurang efisien
2013	1.536.811.928.028,03	1.555.901.880.204,41	98,77%	Kurang efisien
2014	1.605.301.211.464,57	1.682.148.382.104,21	95,43%	Kurang efisien
2015	1.819.224.899.770,10	2.020.688.705.016,79	90,02%	Kurang efisien
2016	2.287.199.857.314,68	2.215.047.135.449,93	103,25%	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah (2017)

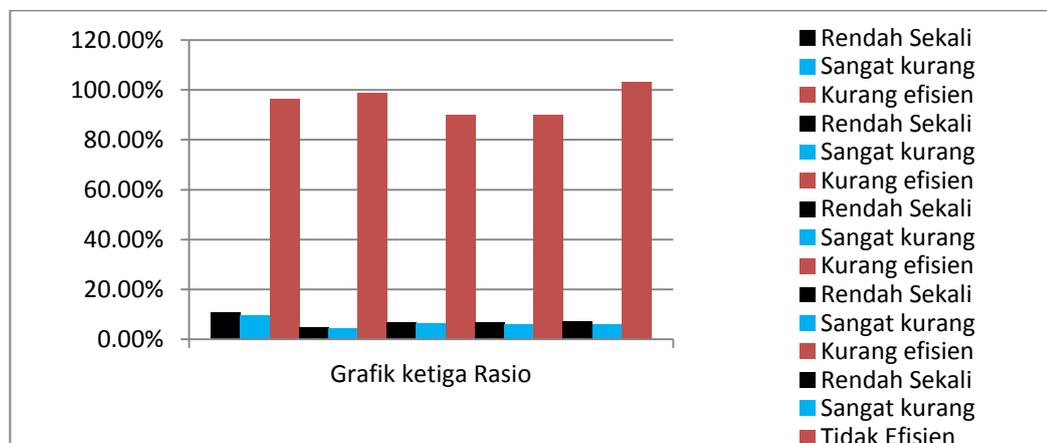
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pengukuran Kinerja Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun anggaran 2012 sampai tahun 2016 mengalami perubahan kriteria yang mana tergolong kriteria Kurang Efisien dan tidak efisien yang berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah. Pada tahun 2012 kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten langkat dilihat dari data total belanja sebesar 1.329.229.102.792,52 dan total pendapatan sebesar 1.378.567.032.459,08 dengan persentase rasio Efisiensi 96,42% hal ini tergolong pada kriteria kurang efisien karena persentasenya berada diantara 90 – 100 %. Pada tahun 2013 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2012, hal ini disebabkan total belanja sebesar 1.536.811.928.028,03 dan total pendapatan sebesar 1.555.901.880.204,41 sehingga persentase rasio efisiensi menjadi 98,77 % dan masih tergolong pada kriteria kurang efisien karena persentasenya berada diantara 90 – 100 %. Pada tahun 2014 Kinerja Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, hal ini di lihat dari total belanja daerah sebesar 1.605.301.211.464,57 dan naiknya total pendapatan menjadi 1.682.148.382.104,21 dengan persentase rasio 95,43% dan masih tergolong pada kriteria kurang efisien karena persentasenya berada diantara 90 – 100%. Pada tahun 2015 Kinerja Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014, hal ini di lihat dari total belanja daerah sebesar 1.819.224.899.770,10 dan naiknya total pendapatan menjadi 2.020.688.705.016,79 dengan persentase rasio 90,02%, walaupun persentase telah menurun akan tetapi masih tergolong pada kriteria kurang efisien karena

persentasenya berada diantara 90 – 100 %. Pada tahun 2016 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2015 hal ini disebabkan karena lebih besarnya total belanja daerah sebesar 2.287.199.857.314,68 dibandingkan dengan total pendapatan yang lebih rendah sebesar 2.215.047.135.449,93 dan persentase naik menjadi 103,25% yang tergolong pada kriteria tidak efisien karena persentasenya berada di atas 100 %.



Gambar IV.3 Grafik Rasio Efisiensi

Dari ketiga perhitungan dan penjelasan rasio diatas maka dapat dilihat gambar grafik ketiga rasio yaitu rasio kemandirian, rasio desentralisasi dan rasio efisiensi sebagai berikut :



B. Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Rasio Kemandirian dan Rasio Desentralisasi Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun 2016 :

a) Rasio Kemandirian Kabupaten Langkat tahun 2012 sampai tahun 2016 termasuk pada kriteria rendah sekali yang berarti peran pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya). Rasio Kemandirian Kabupaten Langkat tahun 2012 sampai tahun 2016 yang masih rendah sekali menggambarkan tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Langkat terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor yaitu kurang berkembangnya pemanfaatan Sumber Daya Alam seperti pada sektor pertanian, pertambangan non migas, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, kurangnya pengetahuan penduduk dalam pengoptimalan pada sektor perikanan yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya dimana kabupaten langkat dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil melalui kecamatan dan desa-desa seperti sungai wampu, sungai batang serangan, sungai lepan dan sungai besitang, serta belum berkembang sektor perekonomian seperti perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, dan perusahaan swasta yang belum ikut membangun daerah Kabupaten Langkat, yang mana secara keseluruhan sektor-sektor tersebut dapat menyumbang pendapatan daerah dan memajukan Daerah Kabupaten Langkat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka terjadilah ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun

2016 terhadap pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya sehingga pemerintah daerah Kabupaten Langkat dapat dikatakan belum mampu mengurus kegiatan pemerintahannya sendiri karena masih besar campur tangan dari pemerintah pusat. Sayangnya, alokasi transfer pada pemerintah daerah lebih banyak didasarkan pada aspek belanja pegawai dan kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukan mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal.

yang mana dijelaskan Mudrajat Kuncoro (2014) dalam bukunya yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Langkat yang mana rendahnya PAD menuntut tingginya pendapatan transfer-dana perimbangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat agar dapat membiayai kegiatan pemerintahannya.

- b) Rasio Desentralisasi fiskal Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun 2016 termasuk pada kriteria sangat kurang yang berarti pemerintah daerah masih sangat kurang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah. Faktor yang terjadi pada Kabupaten Langkat yang menyebabkan rendahnya rasio desentralisasi adalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu; belum tercerminnya penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebenarnya, masih

kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya, lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak/retribusi yang menunggak, pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi masih belum dilaksanakan secara prima, terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana operasional di lapangan, dan belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan.

Dilihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Langkat belum menjalankan otonomi daerahnya secara baik yang mana dalam Mudrajad Kuncoro (2014) mengatakan jika angka persentase PAD terhadap total pendapatan daerah kurang dari 15% menunjukkan betapa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber daerah sendiri, dan apabila bantuan dan subsidi dari pusat lebih mendominasi pembiayaan pembangunan daerah dibandingkan PAD maka kemampuan dalam menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan indikator desentralisasi fiskal dapat dikatakan masih kecil.

Sedangkan penyebab utama rendahnya PAD menurut Mudrajad Kuncoro (2014) adalah; kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan yang mana semua pajak utama yang paling produktif baik langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat, banyaknya pajak daerah ternyata hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan, adanya kekhawatiran pemerintah pusat apabila suatu daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme seperti yugoslavia dan uni soviet yang

merupakan daerah yang cerai berai karena merasa cukup kuat dalam sumber keuangannya oleh karena itu diperlukan sentralisasi agar daerah dapat dikendalikan oleh pusat, dan lemahnya kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Rasio Efisiensi Kabupaten Langkat pada tahun 2012 sampai tahun 2016 :

Tingginya Rasio Efisiensi yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 sehingga termasuk pada kriteria kurang efisien dan tidak efisien yang menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah Daerah belum mampu dalam meminimalkan pengeluaran daerah yaitu dalam bentuk belanja daerah Kabupaten Langkat.

Realisasi belanja pada Kabupaten Langkat meningkat setiap tahunnya dan mendekati realisasi pendapatan bahkan ditahun terakhir lebih besar belanja daerah dibandingkan pendapatan daerah sehingga menyebabkan tingginya rasio efisiensi. Hal ini disebabkan oleh faktor belum adanya kesiapan aparatur-aparatur daerah yang sesuai bidangnya, geografis wilayah yang belum di kondisikan, belum tersedianya infrastruktur pendukung didaerah, dan sistem atau prosedur yang membuat sulit dalam pemungutan Pendapatan Daerah. Sehingga membesarnya alokasi belanja daerah terutama pada belanja operasi yang didominasi oleh belanja pegawai, hampir keseluruhan alokasi belanja daerah masuk pada alokasi belanja operasi sedangkan belanja daerah terdiri dari ; belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

3. Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Berdasarkan Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi dan Rasio Efisiensi efisiensi pada tahun 2012 sampai tahun 2016 :

a) Berdasarkan Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat maka untuk meningkatkan Kinerja Keuangannya yaitu dengan memasarkan Daerah Kabupaten Langkat yaitu seperti memberikan pembelajaran pengelolaan Sumber Daya Alam kepada penduduk di Kabupaten Langkat tentang potensi budidaya perikanan, potensi pertambangan non migas dan pertanian serta listrik gas dan air bersih ini dan dijadikan sebagai produk untuk ditawarkan kepada investor agar mau ikut membangun daerah Kabupaten Langkat ini sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Dengan Mempromosikan daya tarik dan manfaat daerah kepada pihak swasta yang ikut membangun daerah Kabupaten Langkat ini maka sektor-sektor tersebut dapat berperan positif terhadap masyarakat sekitar dan pendapatan daerah Kabupaten Langkat.

Jika setelah dilakukannya solusi tersebut dan rasio kemandirian Kabupaten Langkat dapat meningkat serta telah mencapai kriteria maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat dapat dikatakan telah mandiri dalam membiayai sendiri pembangunan daerahnya dan mengurangi tingkat ketergantungan oleh pemerintah pusat.

b) Berdasarkan Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Rasio Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat maka untuk meningkatkan Kinerja Keuangannya yaitu diperlukan upaya menciptakan

sektor perdagangan, manufaktur, jasa dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada seperti pajak bermotor, menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berlokasi di sektor modern yang umumnya terdaftar sehingga memudahkan pengumpulan pajak, serta meningkatkan administrasi pajak yang relatif menguntungkan agar wajib pajak secara berkelanjutan terus membayar pajak.

Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro(2014;16) untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meningkatkan penerimaan daerah, mengubah pola pemberian subsidi dan meningkatkan pinjaman daerah.

Jika setelah dilakukannya solusi tersebut dan rasio desentralisasi Kabupaten Langkat dapat meningkat serta telah mencapai kriteria maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat dapat dikatakan baik karena masyarakat telah mampu dalam membayar kewajibannya dengan terciptanya desentralisasi yang baik berarti masyarakat di daerah tersebut dapat dikatakan telah sejahtera.

- c) Berdasarkan Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat maka untuk meningkatkan Kinerja Keuangannya yaitu dengan mempersiapkan aparatur-aparatur daerah sesuai bidangnya dalam pelaksana di lapangan sebagai penyelenggara, memiliki pengendalian dan pengawasan di lapangan yang efektif agar tidak terjadi kecurangan dan memperkuat sistem atau prosedur yang sederhana tetapi tepat sasaran untuk mengurangi biaya dalam pemungutan PAD serta menyeimbangi belanja operasi dengan menekankan belanja

modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya.

Jika setelah dilakukannya solusi tersebut dan rasio Efisiensi Kabupaten Langkat dapat meningkat serta telah mencapai kriteria maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat dapat dikatakan telah efisien dalam meminimalkan biaya pemungutan PAD untuk pembangunan daerah Kabupaten Langkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya rasio kemandirian dan rasio desentralisasi, untuk rasio kemandirian disebabkan oleh kurang berkembangnya pemanfaatan Sumber Daya Alam seperti sektor pertanian, pertambangan non migas dan penggalian, industri pengolahan, Rendahnya rasio desentralisasi yaitu belum tercerminnya penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebenarnya, kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya rasio efisiensi yaitu belum adanya kesiapan aparatur-aparatur daerah dan infrastruktur pendukung pembangunan daerah sehingga belanja daerah meningkat.
3. Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan rasio kemandirian, rasio desentralisasi dan rasio efisiensi. Untuk rasio kemandirian yaitu dengan memberikan pembelajaran kepada masyarakat di Kabupaten Langkat tentang pengelolaan Sumber Daya Alam, untuk Rasio desentralisasi yaitu diperlukan upaya menciptakan sektor perdagangan, manufaktur, jasa dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada dan rasio efisiensi yaitu dengan mempersiapkan aparatur-aparatur daerah sesuai bidangnya dalam pelaksana

di lapangan sebagai penyelenggara pembangunan daerah Kabupaten Langkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberi saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah pusat, bila pemerintah pusat tetap memandang pentingnya transfer dengan alasan untuk mengurangi ketidak seimbangan struktur keuangan antar daerah maka sudah saatnya untuk meninjau ulang pola pemberian subsidi kepada pemerintah daerah maka kebijakan pemberian bantuan transfer-dana perimbangan lebih diarahkan pada kebutuhan daerah yang benar tertinggal dari daerah lain.
2. Bagi Pemerintah Daerah, demi terwujudnya Pemerintahan yang mandiri sebaiknya pemerintah daerah lebih menggali dan mengelola potensi-potensi daerahnya agar terciptanya sumber-sumber pendapatan yang baru serta mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada.
3. Bagi peneliti selanjutnya apabila tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, lebih baik menambahkan variabel yang lebih bervariasi dan menambah jumlah observasi penelitian seperti membandingkan antar daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara dan membandingkan observasi penelitian ke dalam kriteria tertentu, misalnya daerah kota/*non* kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007) *“Akuntansi Keuangan Daerah”* Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Halim & Syam Kusufi (2012) *“Teori, Konsep dan Implikasi Akuntansi Sektor Publik”*. Jakarta : Salemba Empat.
- Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih (2010) *“Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah di Berlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon Progo”* Jurnal Bisnis dan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Janabadra. Vol. I. No. 1, Juni (2010)
- Andri Haryanto. (2014) *“Analisis Efektivitas, Kemandirian dan Desentralisasi Pemerintah Kota Medan”* Skripsi Umsu, Medan.
- Arfan Ikhsan, Muhammad Yamin, Heny Tri Astuti Hamdani. (2015) *“Akuntansi Sektor Publik”* Bandung : Ciptapustaka.
- Citra Ananda dan Widyatmini (2012) *“Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun 2009-2011”* Skripsi Universitas Gunadarma Medan.
- Deddi Nordiawan dan Hertianti (2010) *“Akuntansi Sektor Publik”* Jakarta : Salemba Empat.
- Ihyaul Ulum. (2009). *“Audit Sektor Publik Suatu Pengantar”* Edisi satu. Jakarta : Bumi Aksara.
- I Gusti Agung Rai. (2010). *“Audit Kinerja Sektor Publik”* Jakarta : Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2010). *“Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar”* Edisi Ketiga Jakarta: Erlangga.
- Intan Suay Harahap (2015) *“Analisis Tingkat Efektivitas, Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bogor Periode Anggaran 2010-2014)”*. Skripsi STEI Tazkia Bogor.
- Joko Pramono. (2014). *“Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya”*. Skripsi STIE AMA Salatiga.

- Lazyra KS. (2016). "*Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*". Skripsi Umsu, Medan.
- Mahmudi. (2011) "*Manajemen Keuangan Daerah*" Jakarta : PT Erlangga
- Mardiasmo. (2002). "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Edisi dua. Yogyakarta : Andi
- _____. (2009). "*Akuntansi Sektor Publik*". Yogyakarta : CV ANDI Medan : Press.
- Moeheriono. (2014). "*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*" Edisi Revisi Cet.2. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mudrajad Kuncoro. (2014) "*Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*" Edisi 3. Universitas Gajah Mada : Erlangga.
- Muindro Renyowijoyo. (2008) "*Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*" Jakarta : Mitra Wacana media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung CV Alfabeta.
- Syahri Mahbengi. (2017) "*Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah*". Skripsi Umsu, Medan.